

PENGARUH PEMUTIHAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA SAMSAT SURABAYA SELATAN)

Fitria Febrianti Dewi¹, Lis Setyowati²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya

e-mail: fitriafebriantidewi@gmail.com¹, lisasetyowati2021@gmail.com²

Abstrak – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program pemutihan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability / teknik random sampling menggunakan rumus slovin, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa program pemutihan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya Selatan, program pemutihan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya Selatan dengan nilai R square 74,4% dan 25,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci: Program Pemutihan, Sanksi Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Abstract – The purpose of this study is to determine the influence of the whitening program and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers in South Surabaya. This type of research uses quantitative research. This study uses primary data and secondary data. The sampling technique used in this study is probability / random sampling technique using the slovin formula, so that the number of samples in this study is 100 respondents. The results of this study show that the whitening program and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers in South Surabaya, the whitewashing program and tax sanctions have a simultaneous effect on the compliance of motor vehicle taxpayers in South Surabaya with an R square value of 74.4% and 25.6% influenced by other variables.

Keywords: Bleaching Program, Tax Sanctions, And Compliance Of Motor Vehicle Taxpayers.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara peringkat nomor 4 dengan warga negara terbanyak di dunia. Pernyataan ini di dukung oleh data pada Badan Pusat Statistik tahun 2023 dimana jumlah penduduk sebanyak 278,8 juta jiwa. Apabila dibandingkan tahun 2022 jumlah penduduk di Indonesia bertambah sebanyak 1,1% dimana penduduk Indonesia masih berjumlah 275,5 juta jiwa. Bahkan hingga saat ini kenaikan jumlah penduduk Indonesia masih dapat bertambah.

Pertumbuhan penduduk telah meningkatkan mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, terjadi peningkatan kendaraan yang dibutuhkan untuk memberi fasilitas pergerakan masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terutama di kota-kota besar, seperti Surabaya.

Tabel 1 Jumlah Objek Surabaya Selatan

No	Model Kendaraan	Obyek	Rp
1	Sedan	5.111	21.605.697.900
2	Jeep	8.184	46.568.845.100
3	Minibus	79.969	211.909.253.850
4	Microbus	466	1.939.356.300
5	Bus	281	597.133.300
6	Pick up	10.399	19.833.692.800
7	Light Truck	6.273	18.921.647.300

8	Truck	4.820	21.856.301.100
9	Blind Van	2.025	3.802.294.200
10	Sepeda Motor roda 2	288.060	57.719.115.400
11	Sepeda Motor roda 3	1.217	273.407.000
12	Kendaraan Bermotor Air	-	-
13	Alat Berat	-	-
TOTAL		406.805	404.026.744.250

Sumber: UPT Bapenda Surabaya Selatan

Terlihat pada tabel 1 bahwa pada tahun 2023 jumlah keseluruhan kendaraan di wilayah Surabaya Selatan mencapai 406.805 tentunya hal tersebut dapat menyebabkan kemacetan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut pemerintah Surabaya mengupayakan pelebaran jalan di beberapa wilayah. Dana yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pembangunan tentu tidak sedikit. Penerimaan dana terbesar di Provinsi Jawa Timur berasal dari pungutan pajak kendaraan bermotor. Hal ini selaras dengan pernyataan Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Emil Dardak, beliau mengatakan bahwa salah satu pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Jatim ditopang oleh pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2 Target dan Realisasi

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen
1	2018	333.915.000.	400.393.394.100	119,91
2	2019	392.000.000.	417.195.964.050	114,25
3	2020	337.000.000.	384.967.718.950	114,23
4	2021	382.000.000.	408.636.079.984	106,97
5	2022	400.300.000.	444.491.817.782	111,04
6	2023	431.445.000.	443.689.175.575	102,84

Sumber: UPT Bapenda Surabaya Selatan

Terlihat pada tabel 2 bahwa pencapaian realisasi pendapatan pajak dari tahun 2018-2023 selalu melebihi target. Namun target realisasi dari tahun 2018 sampai 2021 selalu mengalami penurunan. Hanya di tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,07. Penurunan target realisasi yang paling besar pada tahun 2022 ke 2023 mencapai 8,2%. Menurunnya pencapaian realisasi terlihat juga bahwa kepatuhan wajib pajak ikut menurun yang menyebabkan tunggakan pajak kendaraan bermotor terutang semakin meningkat.

Tabel 3 Sisa Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sisa NTP Tahun 2017-2022
Periode s.d Bulan Desember 2023

Tahun	Sisa Tunggakan		
	Objek	Rupiah	%
2017	9.511	2.424.427.950	94,17
2018	10.698	2.889.462.100	90,14
2019	12.977	3.717.177.400	75,69
2020	21.680	7.350.452.200	74,23
2021	23.199	8.052.673.300	63,38
2022	31.565	13.712.265.850	49,06
Jumlah	109.630	38.146.461.800	63,25

Sumber: UPT Bapenda Surabaya Selatan

Dilihat dari tabel 3 bahwa sisa tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Surabaya Selatan masih banyak. Dari tahun per tahun tunggakan semakin meningkat. Total keseluruhan sisa tunggakan pajak kendaraan bermotor dari 2017 sampai

bulan Desember 2023 mencapai di angka 109.630 kendaraan dan sebesar Rp 38.146.461.800. Tunggakan yang masih banyak berada di tahun 2017 yang dimana tingkat persentase sisa tunggakan sebesar 94,17%.

Tunggakan pajak kendaraan bermotor di Wilayah Surabaya Selatan terjadi karena kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain kurangnya penegasan dalam sanksi terhadap pelanggar wajib pajak kendaraan bermotor juga menjadi salah satu faktor. Maka dari itu, pemerintah membuka program pemutihan yang dimana dapat memberikan keringanan, pembebasan, dan insentif pajak. Dari beberapa uraian di atas, penulis tertarik mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya Selatan (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan sebagai alat penelitian yang banyak menggunakan angka dan statis, baik dimulai dari proses pengumpulan data sampai hasil akhir pengolahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Ketepatan angket ditentukan dengan menggunakan validitas tes. Jika item pada kuesioner dapat dibandingkan dengan nilai r hitung dalam tabel nilai r untuk derajat kebebasan (df) = $n-2$, maka kuesioner tersebut dianggap valid. Aplikasi SPSS menjadi pilihan peneliti untuk mengolah data dan menentukan nilai r hitung. Dalam penelitian ini, sampel terdiri dari 100 orang, sehingga dari perhitungan derajat kebebasan diperoleh hasil 98. Tingkat batas valid data adalah senilai 0,197 untuk dF sebanyak 98 dengan tingkat signifikansi atau alfa 0,05 (5%).

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan	Kategori
X1	0,910	Reliabel	Sangat Reliabel
X2	0,904	Reliabel	Sangat Reliabel
Y	0,845	Reliabel	Sangat Reliabel

Sumber : Diolah Penulis

Dari hasil olah SPSS, Cronbach's Alpha untuk setiap variabel diperoleh lebih tinggi dari 0,80. Jadi bisa disimpulkan bahwa item-item kuesioner yang berkaitan dengan variabel program pemutihan (X1), sanksi pajak (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid, yang menunjukkan bahwa mereka layak digunakan sebagai instrumen pengukuran mereka cocok untuk digunakan sebagai instrumen pengamatan.

Uji Normalitas

Tabel 5 Output Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	102
Normal Parameters	Mean 0,000000
	Std.Deviation 2,5855536
Most Extreme Differences	Absolute 0,106
	Positive 0,058
	Negative -0,106
Kolmogorov-Smirnov Z	1,072
Asymp.Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber : Diolah Penulis

Nilai signifikansi (sig) adalah 0,200 ditunjukkan dari hasil tes normalitas. Dikarenakan nilai sig > 0,05, ini mengindikasikan bahwa data yang diuji tidak mengalami deviasi signifikan dari distribusi normal. Dengan kata lain, data yang dianalisis dianggap mengikuti distribusi normal, yang sangat penting untuk validitas beberapa uji statistik yang memerlukan asumsi normalitas data.

Uji Multikolinieritas

Tabel 6 Output Hasil Uji Multikolinieritas

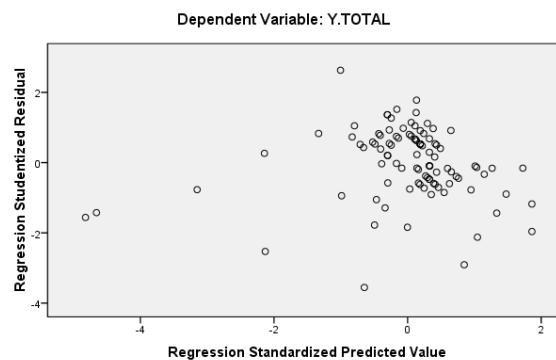
Variabel	Collinearity Statistics		Hasil
	Tolerance	VIF	
Program Pemutihan (X1)	0,422	2,369	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sanksi Pajak (X2)	0,422	2,369	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Diolah Penulis

Nilai VIF untuk variabel program pemutihan dan sanksi pajak masing-masing adalah 2,369, sehingga semua nilai VIF < 10. Dapat diambil kesimpulan jika tidak terjadi multikolinieritas antara variabel dependen.

Uji Heterokedastisitas

Gambar 1
Scatterplot



Sumber : Diolah Penulis

Hasil uji menunjukkan bahwa asumsi-asumsi berikut terpenuhi, sebagaimana digambarkan pada gambar diatas bahwa tidak terdapat pola yang konsisten, karena semua titik residual tersebar secara random dan tidak ada pola yang terbentuk, seperti corong, melengkung, kipas. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila asumsi-asumsi ini terpenuhi, maka data yang dianalisis terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk memahami bagaimana variabel independen (Y) dipengaruhi oleh variabel dependen (X). Selain itu, analisis regresi juga berguna untuk menguji validitas hipotesis penelitian. Berdasarkan dari hasil uji SPSS, diketahui persamaan regresi liner berganda dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y = 3,525 + 0,125 X_1 + 0,599 X_2$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

X₁ = Program Pemutihan

X₂ = Sanksi Pajak

Uji T (Parsial)

Uji yang dikenal juga dengan uji parsial ini menilai apakah koefisien regresi dari masing-masing variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel dependen.

Dapat dikatakan signifikan apabila nilai Sig < 0,05 atau T hitung > T tabel. Berdasarkan hasil SPSS menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Didapati hasil bahwa uji t program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah $0,000 < 0,05$ dan value t hitung $10,400 > \text{value t tabel } 1,985$. Rumus t tabel = $t(\alpha/2 ; n-k-1) = (0,025;97)$. Akibatnya, program pemutihan dianggap memiliki pengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Didapati hasil bahwa uji t sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah $0,000 < 0,05$ dan value t hitung $16,554 > \text{value t tabel } 1,985$. Rumus t tabel = $t(\alpha/2 ; n-k-1) = (0,025;97)$. Akibatnya, program pemutihan dianggap memiliki pengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji F (Simultan)

Tabel 7 Output Hasil Uji F
Anova^b

Model		Sum of Squares	dF	Mean Square	F	Sig
1	Regression	1965,482	2	982,741	114,094	0,000 ^a
	Residual	675,195	99	6820		
	Total	2640,676	101			

Sumber : Diolah Penulis

Dilihat dari tabel diatas, hasil uji F memperlihatkan hingga value signifikansi untuk program pemutihan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah $0,000 < 0,05$, dan value F hitung sebesar $114,904 > \text{value f tabel } 3,09$. Akibatnya, H_0 ditolak dan H_a diterima, menandakan jika program pemutihan dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara simultan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8 Output Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,863 ^a	0,744	0,739	2,612

Sumber : Diolah Penulis

Menurut tabel 8, nilai R square sebesar 0,744 atau 74,4% dapat dinyatakan dua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel Y sebesar 74,4%. Sisa pengaruh sebesar 25,6% berasal dari aspek lain yang tidak termasuk dalam variabel tersebut.

Pembahasan

1. Pengaruh Program Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya Selatan

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel program pemutihan menurut data responden. Diketahui bahwa hasil analisis uji t yaitu sebesar $10,400 > 1,985$ menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah $0,000 < 0,05$. Maka dari itu, fenomena ini menandakan bahwasannya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh program pemutihan.

Program ini juga membawa dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena program ini memberikan manfaat bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan dan terkena sanksi administrasi. Melalui program pemutihan ini maka wajib pajak terbebas dari sanksi administrasi dan biaya bea balik nama. Disarankan kepada Pemerintahan dan SAMSAT Surabaya untuk melakukan penyuluhan dan menginformasikan mengenai program pemutihan agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat serta berdampak baik juga kenaikan pendapatan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pranata & Nurmala, 2022).

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya Selatan

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel sanksi pajak berdasarkan data responden. Hasil analisis uji t sebesar $16,554 > 1,985$ menunjukkan bahwa signifikansi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, diambil kesimpulan bahwa semakin besar sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Surabaya Selatan. Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan mengenai keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang akan dikenakan denda sebagai sanksi administrasi yang besarnya bergantung pada lamanya keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Wajib pajak juga memahami bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor harus diterapkan secara konsisten dan tegas, sehingga wajib pajak tetap membayar denda jika terlambat dan mematuhi peraturan perpajakan sebagai bagian dari upaya mendidik mereka. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah Kota Surabaya memperkuat sanksi perpajakan dengan melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Akhyar, 2022).

3. Pengaruh Program Pemutihan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya Selatan

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel program pemutihan dan sanksi pajak menurut data responden. Nilai uji F hitung sebesar 114,904 melebihi nilai F tabel sebesar 3,089, dan nilai signifikansi untuk program pemutihan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah $0,000 < 0,05$. Maka dari itu, H_0 ditolak dan H_a diterima. Fenomena ini mengindikasikan bahwa program pemutihan dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam analisis data, ditemukan bahwa program pemutihan dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa program pemutihan dan penerapan sanksi pajak terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan. Semakin besar sanksi pajak yang diterapkan pada wajib pajak yang terlambat membayar, semakin tinggi pula kepatuhan mereka. Selain itu, semakin banyak penyuluhan tentang program pemutihan yang dilakukan, maka banyak wajib pajak yang membayar pajak. Disisi lain, program pemutihan juga memberikan insentif bagi wajib pajak yang memiliki keterlambatan pembayaran, sehingga meningkatkan kesadaran dan keinginan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Kombinasi dari kedua faktor ini terbukti berhasil dalam mendorong kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan mengenai pengaruh program pemutihan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya Selatan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan adalah (1) Terdapat pengaruh positif program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuktikan bahwa program pemutihan terbukti dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena program pemutihan dapat meringankan masyarakat dalam pembebasan denda maupun bea balik nama (2) Terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena semakin tinggi sanksi pajak yang diterapkan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) Terdapat pengaruh program pemutihan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara simultan. Hal ini membuktikan bahwa program pemutihan dan sanksi pajak terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, selain itu juga dapat

meningkatkan pendapatan daerah.

Saran

Penelitian ini hanya menerapkan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Diharapkan penelitian berikutnya dapat menambah teknik pengumpulan data, seperti menggunakan wawancara atau observasi secara langsung terhadap responden agar dapat menggali informasi lebih dalam dan jelas. Diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat mengeksplor dan menggunakan variabel-variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, H. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Ambon. *Jurnal Akuntansi*. [https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/41461/Skripsi Helmi Akhyar_1501035050.pdf?sequence=1](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/41461/Skripsi_Helmi_Akhyar_1501035050.pdf?sequence=1)
- Anita. (2023). Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Seluruh Indonesia 2023. *Pemerintahkota.Com*. <https://pemerintahkota.com/jadwal-pemutihan/>
- Gifari, (Universitas Islam Indonesia/ Marini Ayu. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta). 56.
- Lesmana, J. E. (2019). Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2019. *Mitra Wacana Media*.
- Pranata, A., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- Rahayu, S. K. (2020). PERPAJAKAN Konsep, Sistem dan Implementasi (Pertama). *REKAYASA SAINS*.
- Resmi, S. (2019). *PERPAJAKAN Teori & Kasus* (G. Sartika (ed.); 11th ed.). Salemba Empat.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2508>
- Rizki, (Universitas Negeri Semarang/Kurnawan). (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan E-Samsat Sebagai Variabel Moderasi. *Google Scholar*, 95.
- Suryadi, E. (2023). Konsekuensi Tidak Membayar Pajak Motor: Denda dan Sanksi Hukum yang Harus Dihadapi. *Anak Motor*. <https://anakmotor.id/pajak-surat-surat/konsekuensi-tidak-membayar-pajak-motor-denda-dan-sanksi-hukum-yang-harus-dihadapi-13178>.